

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFISIENSI,
DAN RASIO AKTIVITAS
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 - 2017**



Disusun Oleh :

Nama : Prasti Agustina

Nomor Mahasiswa : 141214902

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari'at-syari'atnya, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs.Muhammad Subkhan,MM selaku Ketua STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.
2. Drs.Zulkifli,MM selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dosen program studi Akuntansi STIE WIDYA WIWAHA Yogyakarta yang telah mendidik, membina dan mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
4. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan penuh keihlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya.
5. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis khususnya.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Maret 2018

Penulis

(Prasti Agustina)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2017 dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efisiensi, (3) Rasio Efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap data keuangan yang di peroleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Tehnik Analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efisiensi, (3) Rasio Efektivitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari (1) Rasio Kemandirian rata-rata kemandirianya sebesar 10% masih tergolong rendah, jika di lihat dari Rasio Efisiensi rata-rata rasionya sebesar 75% tingkat keefesiansinya masih rendah dan dilihat dari rasio Eektivitas Rata-rata rasionya 94% tingkat ke eektivitasnya masih belum eektif.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemnadirian keunagan daerah, Rasio Efisiensi keungan daerah, Rasio Eektivitas Keungan dearah.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Teori	7
2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah	7
2.1.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	8
2.1.3. Penelitian Yang Relevan.....	14
2.1.4 Rerangka Berpikir.....	17
2.1.5. Paradigma Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.2. Sumber Daya.....	20
3.3. Desain Penelitian	20
3.4. Subjek dan Objek Penelitian.....	21

3.5. Variabel Penelitian.....	21
3.6. Teknik Analisis Data	21
3.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	21
3.6.2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	22
3.6.3. Rasio Efektivitas PAD.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo	25
4.1.1 Data Khusus	26
4.2. Analisis Data.....	28
4.3. Pembahasan.....	33
4.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
4.3.2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	34
4.3.3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, social dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi *Single Entry* dan *Cash Basis* menjadi Sistem Akuntansi *Double Entry* dan *Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian

dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam

melakukan belanja daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Kulon Progo adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Kulon Progo dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *"Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, dan Efektivitas, Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017."*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari rasio Efisiensi ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah ?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang diteliti difokuskan pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2014-2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan menerapkan Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Efektivitas, serta Rasio Pertumbuhan, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari teori Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Efektivitas, serta Rasio pertumbuhan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo ditinjau ditinjau dari Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Efektivitas, serta Rasio pertumbuhan Daerah
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bidang yang sama.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja

dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuandan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap

APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, dan Rasio efektivitas

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.1.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dengan judul "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti : Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio.

Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika

dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbedaannya adalah di penelitian ini tidak menggunakan Rasio Keserasian, sedangkan pada penelitian penulis ada. Perbedaan lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah pada tahun 2015.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan

daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Kemudian efisiensi PAD Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010).

2. Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio pertumbuhan Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Soppeng tahun 2011, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptifkuantitatif, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Klaten tahun 2014, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015.

2.1.4. Rerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo

dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Dibawah ini ada empat macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo :

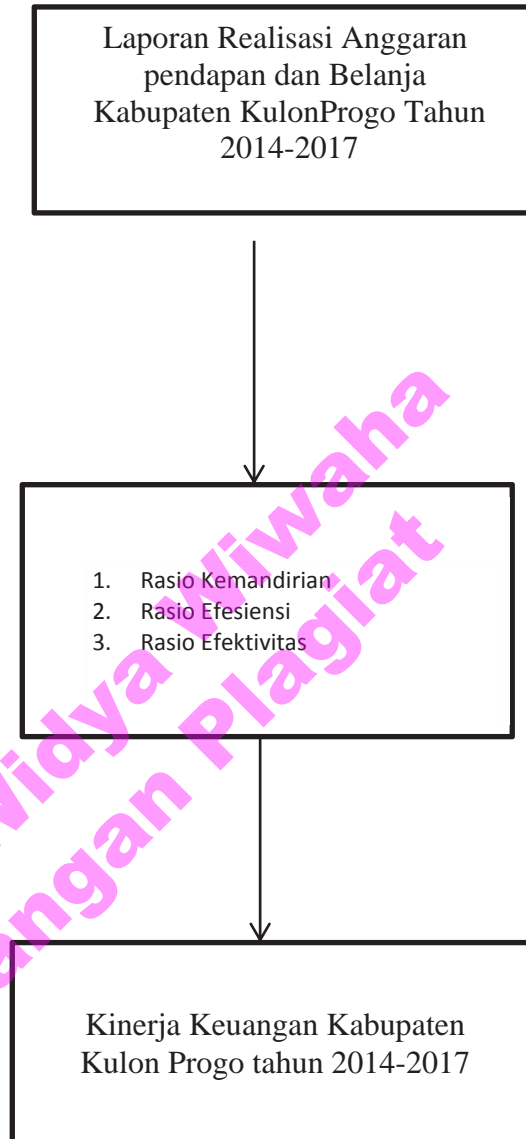
- a. Rasio Kemandirian
- b. Rasio Efisiensi
- c. Rasio Efektivitas

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kulon Progo dapat dikatakan baik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.5. Paradigma Penelitian

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di www.djpk.kemenkeu.go.id pada periode 4 tahun mulai tahun 2014-2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.

3.2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari internet dengan situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Jenis data yang digunakan adalah berupa laporan keuangan (Data Anggaran dan Pendapatan, serta Realisasi Anggaran APBD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3.3. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Kemandirain, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 -2017.

3.5. Variabel Penelitian.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD

3.6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis data adalah:

3.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan

oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

3.6.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

3.6.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mohamad Mahsun (2012:187), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197 Ha (0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315 Ha (5,65%).

4.1.1. Data Khusus

Tabel 4.1. Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
		A	Pendapatan	1.227.474.672.766,37
1	Pendapatan Asli Daerah	170.822.326.558,34	86.009.496.706,91	242.829.753.091,61
2	Pendapatan Transfer	1.054.106.257.006,03	609.115.542.280,00	-
3	Pendapatan lain-lain yang sah	127.795.172.721,48	23.378.283.000,00	227.947.789.179,29
B	BELANJA	1.142.545.631.178,06	585.212.499.706,00	1.502.922.310.482,74
1	Belanja Operasi	916.292.935.774,06	549.457.856.363,00	-
2	Belanja Modal	226.055.713.904,00	35.620.695.343,00	-

3	Belanja Tak terduga	196.981.500,00	133.948.000,00	3.664.372.588,11
4	Transfer	100.524.321.721,00	0,00	-
5	Surplus/Defesit	(15.595.280.132,69)	133.290.822.280,91	-

Tabel 4.2. APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017
(dalam ribuanRupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
A	PENDAPATAN	1.221.514.214.33	718.503.321.986,	1.443.531.103.770,
		4,50	91	90
1	Pendapatan Asli Daerah	155.969.689.70	86.009.496.706,91	242.829.753.091,
		3,30		61
2	Pendapatan Transfer	1.062.586.792.23	609.115.542.280,	-
		1,70	00	
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	114.551.125.24	23.378.283.000,0	227.947.789.179,
		7,78	0	29
B	BELANJA	1.251.716.432.37	585.212.499.706,0	1.502.922.310.482,
		1,55	0	74

1	Belanja Operasi	1.012.753.639.329,18	549.457.856.363,00	-
2	Belanja Modal	237.756.843.935,00	35.620.695.343,00	269.171.387.683,60
3	Belanja Tak Terduga	1.205.949.107,37	133.948.000,00	3.664.372.588,11
4	Transfer	100.492.098.863,66	0,00	-
Surplus/Defisit		(130.694.316.900,71)	133.290.822.280,91	-
Sumber data : DPPKAD Kulon progo				

4.2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang didapat dari Internet daerah (DPPKAD) Kabupaten Kulon Progo. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kulon Progo. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan T ransfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di tabel 4.3.di bawah ini :

Tabel 4.3.Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2015	170.822.326.558,	1.054.106.257.006,03	16%	Intruktif
2016	86.009.496.706,9	609.115.542.280,00	14%	Intruktif
2017	221.215.012.961,	0	0%	Intruktif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3.di atas kemampuan

keuangan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Berdasarkan perhitungan nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2017 dimana nilainya sebesar 0% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 16%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel

4.4. di bawah ini :

Tabel 4.4.Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD

Kabupaten Kulon Progo		Realisasi PAD 2015-2017		
Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2015	1.142.545.631.178,06	1.227.474.672.766,37	93%	Efisien
2016	226.055.713.904,00	718.503.321.986,91	31%	efisien
2017	1.440.263.093.213,57	1.402.546.137.805,59	103%	tidak efesien

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4.di atas dapat diketahuibahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kulon Progo padatahun 2015 dan 2016 tergolong efisien karena nilai rasionya di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2017 tergolong tidak efesien karena nilai rasionya diatas 100%.

Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Eektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 .Perhitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten _____ Kulon Progo Tahun Anggaran 2015-2017 _____

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2015	155.969.689.703,30	170.822.326.558,34	91%	Tidak
2016	86.009.496.706,91	86.009.496.706,91	100%	Efektif
2017	221.215.012.961,59	242.829.753.091,61	91%	Tidak

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 91%. Tahun 2016 sudah efektif berimbang karena nilai yang diperoleh 100% , sedangkan tahun 2017 diperoleh nilai rasionya

sebesar 91%.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2015 sebesar 16%, tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 14%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 0%. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah mengalami penurunan. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instrukturif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan

dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Berawal pada tahun 2015 Rasio Kemandirian sebesar 16%, kemudian turun menjadi 14% pada tahun 2016, pada tahun 2017 Rasio Kemandirian turun sebesar 0%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

4.3.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah bahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 dan 2016 tergolong efisien karena nilai rasionya di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2017 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya diatas 100%. Meskipun rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

4.3.3 Rasio Efektivitas Keuangan daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu sebesar 91%, tahun 2016 yaitu 100%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 91 %.

Menurut hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kulon Progo belum Efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 94%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali tetapi ada peningkatan di tahun 2017 kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2015 sebesar 16 % , tahun 2016 turun menjadi 14% , kemudian tahun 2017 turun menjadi 0%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum Efisien, rata-rata rasionya sebesar 75%. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya sebesar 93%, kemudian tahun 2016 menjadi 31%, tahun 2017 sebesar 103 %.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tidak tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 94%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2015 91%, tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 91%

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mampu meningkatkan dan

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 3 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

STIE Widya Wivana
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Bahrhun Assidiqi. (2014). "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012".*Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitriyah Agustin. (2007). "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)".*Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jusmawati.(2011). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah".*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi.(2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : BPFPE.
- Nurhidayat.(2005). Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004.
Bandung : Nuansa Aulia.

Hermi Oppier.(2013). "Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara". *Jurnal Benchmark* Volume 2 November 2013.

Ratna Sholikhah. (2011). "Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009".Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<http://www.kulonprogo.go.id/>.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat